BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Pengertian perusahaan

2.1.1 Sejarah POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

a. Masa Kerajaan

Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu hingga saai ini sosok Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian RI dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian.

b. Masa kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan

orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (Jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

c. Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

d. Awal kemerdekaan Indonesia (Periode 1945-1950)

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

VISI POLRI :

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan

proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

MISI POLRI :

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. 4Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyekit msyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan msyarakat;
13. menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana terebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupn masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undng-Undang itu juga telah memberikan Kewennagan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya ttresbut antara lain;

1. memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
6. memberikan izin dan malakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. melaksanakan kewenangan laian yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidanan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penannganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka melakukan tindak pidana;
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai berikut;
    A. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
    B. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
    C. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
    D. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
    E. menghormati hak azasi manusia.

2.1.2 Sejarah Bid TI

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005, tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Bidang Telematika merupakan unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada di bawah Kapolda.

Bidang Telematika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan Telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan Data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Berdasarkan Organisasi Bidang TI Polri Polda Jabar disusun berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda).

Bidang TI Polri Polda Jabar Bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia

VISI

1. Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Profesional, bermoral, modern serta bermanfaat dalam mendukung Visi Polda Jabar

MISI :

1. Meningkatkan pelayanan/pengembangan informasi dan multimedia bidang operasional dan pembinaan kepada satker/satwil di Jajaran Polda Jabar, dalam pembuatan/pengolahan/pengembangan DPP Gaji sehingga kedepan masing-masing Bensatker dapat membuat/mengolah gaji.
2. Meningkatkan dan mengembangkan data/informasi GKTM dan Hiltem Ranmor yang selalu mutakhir (up to date) sehingga dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas operasional kepolisian.
3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM Jajaran Polda Jabar, sehingga dapat dan menguasai IT (Teknologi Informatika).

4. Meningkatkan sarana dan prasarana sistem komunikasi yang dapat mengcover seluruh Jajaran Polda Jabar, sehinga dinamika Operasional khususnya komunikasi dapat dilaksanakan secara optimal.
5. Meningkatkan nilai moral/agama dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari serta dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

2.2 Bentuk Badan Hukum Perusahaan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

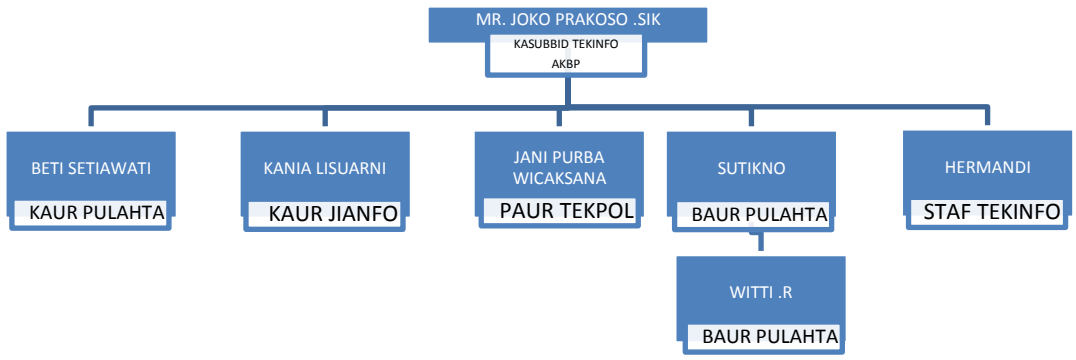
2.3 Bidang Perusahaan

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri meruapakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeligharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negera Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan effisien, maka wilayah negara

Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negra Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peaturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

2.1.2 Analisis kegiatan SUBBID TEKINFO



STRUKTUR ORGANISASI TEKINFO

2.1.3 Urusan pengumpulan Data (Urpullahta)

a. Kaur Pullahta

1. Mengawasi pelaksanaan dan memonitor pengumpulan / pengolahan data bin.
2. Mengawasi pengumpulan data dan pengolahan / penyajian data serta informasi yang menyangkut aspek pembinaan
3. Mengawasi proses pengolahan, pencetakan dan pendistribusian DPP Gaji serta laporan bulanan ke Mabes Polri berupa hasil pengolahan DPP gaji setiap bulan.
4. Mengawasi penerimaan dan pemeriksaan laporan perubahan data penghasilan personel.
5. Mengawasi proses pengakurasian data penghasilan DPP gaji menggunakan program aplikasi DPP Gaji.
6. Mengawasi pengakurasian dan pengecekan data Ranmor Hiltem.

b. Paur Pullahta

1. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data bin di lingkungan Polda Jabar.
2. Melaksanakan koordinasi untuk mengirimkan data bin dan ops sesuai dengan format yang telah di tetapkan.
3. Melaksanakan pengakurasian data bin dan ops secara rutin.
4. Memelihara sarana dan prasarana komputer pengolahan data.

c. Banum Pullahta Bin / DPP Gaji

1. Menerima laporan perubahan data penghasilan personel yang diajukan oleh bendahara satker Polda Jabar.
2. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi perubahan data penghasilan, pengecekan data dan pengkodean.
3. Melaksanakan entry data dengan menggunakan program aplikasi DPP Gaji Polda Jabar.
4. Melaksanakan check list data.
5. Melaksanakan proses pengolahan dan perhitungan DPP Gaji Polda Jabar.
6. Melaksanakan pencetakan dan pendistribusian Daftar Gaji ke masing – masing SatKer(Satuan Kerja) Polda Jabar.

7. Melaksanakan evaluasi dan Backup data DPP Gaji setiap bulan.
8. Melayani permintaan data untuk Satker(SatuanKerja) Mapolda Jabar.
9. Memelihara program aplikasi dan jaringan data yang ada di ruangan computer DPP Gaji Polda Jabar.
10. Membuat dan menyampaikan laporan Kuat Pers Polda Jabar berdasarkan DPP Gaji setiap bulan ke Pus Tek Info Divisi Ti Polri.

d. Banum Pullahta Ops / Ranmor Hiltem

1. Melaksanakan pengumpulan data situasi kamtibmas harian dari K31 Biro Ops Polda Jabar dan Laporan bulanan rutin.
2. Melaksanakan pengkodean dan entry data Hiltem ranmor R – 2 dan R – 4.
3. Membuat, merevisi,memelihara dan mengelola program aplikasi Hiltem ranmor R – 2 dan R – 4.
4. Menyiapkan output data untuk pelaporan data Hiltem ranmor R – 2 dan R – 4.
5. Menyiapkan pemeriksaan dokumen administrasi dan cara penyajian data Ranmor hiltem.
6. Melaksanakan proses updateting data Ranmor hiltem.
7. Melaksanakan perawatan dan memelihara system operasional computer Ranmor hiltem.
8. Melaksanakan evaluasi dan backup data Ranmor hiltem.
9. Memelihara sarana dan prasarana.

2.1.3 Urusan Penyajian Informasi Urjianinfo

a.Kaur Jianinfo

1. Melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian personel bagian Jianinfo mengenai tugas, fungsi, dan peran masings – masing meliputi bidang administrasi, pengumpulan data baik yang bersifat internal Polda Jabar maupun dari SatKer(SatuanKerja) / kewilayahan, dicatat dalam buku registrasi.
2. Menganalisa dan mengevaluasi rencana kegiatan dan program kerja serta pengolahan data setiap bulan.

b.Paur Jianinfo

1. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di Polda Jabar
2. Melaksanakan koordinasi untuk mengirimkan data administrasi
3. Melaksanakan pengakurasian secara rutin.
4. Memelihara sarana dan prasarana komputer pengolahan data.

2.1.4 Urusan Administrasi (Urmin)

a. **Kaurmin**

1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi UKP dan Kenaikan Gaji berkala.
2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi usulan Ijin / Cuti.
3. Mengerahkan personel untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal Biro SDM.
4. Menyelenggarakanpelayanan administrasi usulan pengangkatan kedalam jabatan atau pindah ke Satker(Satuan Kerja).
5. Menyusun / mengatur jadwal piket.
6. Memantau kehadiran personel dan melaporkan hasilnya ke bagian Kasubbag Renmin.
7. Menyelenggarakan pelayanan administrasi usulan seleksi pendidikan kejuruan
8. Menyelenggarakan administrasi material, Inventarisasi dan rekonsiliasi data dengan Biro Sapras Polda Jabar dan KPNL I Bandung (SIMAK BMN).
9. Melaksanakan pelayanan Sarpras dilingkungan Bid TI Polri Polda Jabar.
10. Melaksanakan penilaian kinerja personel dengan menerapkan Sistem manajemen Kinerja (SMK) dan menyampaikan laporan hasil penilaian SMK per semester ke Biro SDM.
11. Menyiapkan dan menunjuk personel untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai perintah pimpinan.
12. Menyelenggarakan administrasi data personel.
13. Menyusun Standar Akreditasi Polri (SAP) dan menyiapkan bahan wasrik dan menindak lanjuti temuan wasrik.

14. Bersama – sama Kaurren, Kaurkeu, dan Kaurtu menyiapkan bahan wasrik dan menindak lanjuti temuan wasrik.
15. Mengadakan koordinasi dengan Biro SDM Polda Jabar dalam rangka pembinaan dan perawatan personel.

b. Pamin Urmin

1. Melaksanakan pelayanan administrasi UKP atau Kenaikan Gaji berkala.
2. Melaksanakan pelayanan administrasi usulan pengangkatan ke dalam jabatan atau mutasi pindah satker.
3. Melaksanakan pelayanan administrasi usulan Ijin Cuti.
4. Menyiapkan personel untuk mengikuti kegiatan Binrohjas sesuai dengan jadwal Biro SDM.
5. Membuat / mengatur Jadwal Piket.
6. Membuat dan menyiapkan daftar kehadiran personel,merekap dan melaporkan hasilnya ke Kaurmin.
7. Mendistribusikan Skep (Surat Keputusan) / Sprin (Surat Perintah).
8. Membuat dan menyampaikan laporan kuat pers ke Biro SDM atau Satker lain sesuai dengan permintaan.
9. Melaksanakan administrasi material, Inventarisasi BMN dan rekonsiliasi data Sarpras dengan Biro Sarpras Polda Jabar dan KPNL I Bandung (SIMAK BMN).
10. Melaksanakan pelayanan administrasi usulan seleksi pendidikan kejuruan dan pendidikan pengembangan.
11. Melaksanakan pelayanan Sarpras.
12. Menyusun penilaian kinerja personel dengan menerapkan Sistem Managemen Kinerja (SMK) dan menyampaikan laporan hasil penelitian SMK per semester ke biro SDM.
13. Menyiapkan personel untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai perintah pimpinan.

2.1.5 Urusan Tatausaha (Urtu)

a. **Kaurtu**

1. Menerima, mencatat, dan menyampaikan surat masuk ke pimpinan
2. Menerima dan mendistribusikan surat masuk sesuai disposisi pimpinan.
3. Melaksanakan pengarsipan surat – surat masuk dan surat berharga lainnya.
4. Melaksanakan penataan administrasi.
5. Menyiapkan rapat dan membuat risalah rapat.
6. Mencatat dan menyiapkan jadwal kegiatan pimpinan / Kabid Ti Polri.
7. Menyusun dan mengetik konsep surat keluar.
8. Melaksanakan pengesahan surat ke Pimpinan.
9. Mengajukan pengesyahan surat ke Pimpinan.
10. Menyelenggarakan pendistribusian surat yang dituju.

b. **Pamin Urtu**

1. Menerima, mencatat, dan menyampaikan surat masuk ke pimpinan
2. Menerima dan mendistribusikan surat masuk sesuai disposisi pimpinan.
3. Melaksanakan pengarsipan surat – surat masuk dan surat berharga lainnya.
4. Melaksanakan penataan administrasi.
5. Menyiapkan rapat dan membuat risalah rapat.
6. Mencatat dan menyiapkan jadwal kegiatan pimpinan / Kabid Ti Polri.
7. Menyusun dan mengetik konsep surat keluar.
8. Melaksanakan pengesahan surat ke Pimpinan.
9. Mengajukan pengesyahan surat ke Pimpinan.
10. Menyelenggarakan pendistribusian surat yang dituju.

2.1.6 Urusan Keuangan Urkeu

a. **Kaur Keu**

1. Mengelola Anggaran sesuai dengan DIPA TAB.
2. Menyiapkan dan mengurus Bidang Keuangan dalam Pengajuan dan Penerimaan serta pengeluaran anggaran guna mendukung kelancaran tugas Operasional Perkantoran.
3. Menyusun dan menyiapkan anggaran yang diperlukan Kabid Ti Polri Polda Jabar selaku KPA dan para Kasubbid serta para Kasubbag dalam melaksanakan tugas ke dinasan dan tugas khusus.
4. Membuat konsep pengajuan, penarikan anggaran dan membayar keperluan pimpinan dan staf.
5. Mengkoordinasikan atas laporan penarikan dan pencairan serta penggunaan anggaran DIPA TAB guna menunjang dalam penyusunan bahan pembuatan laporan dan Perwabku TAB.
6. Menyelenggarakan administrasi keuangan baik belanja pegawai dan belanja barang sesuai DIPA RKA – KL, POK Bid Ti Polri Jabar Tab.
7. Mengadakan koordinasi dengan Bidkeu Polda Jabar dalam pelaksanaan administrasi keuangan.
8. Mengadakan koordinasi dengan Biro Ops Polda Jabar dalam rangka pendistribusian dana untuk mendukung kegiatan operasi kepolisian terpusat dan operasi kepolisian kewilayahan.
9. Mengadakan koordinasi dengan KPPN dalam rangka proses pengajuan SPM dan penerbitan SP2D.
10. Mengadakan koordinasi dengan Bank dalam proses pencairan dana.

b. Pamin Urminkeu

1. Membuat laporan pengeluaran bendahara dengan menggunakan program Aplikasi SPM.
2. Membuat laporan pengeluaran bendahara dengan menggunakan program Aplikasi SAPKA.
3. Membuat laporan rekonsiliasi sarpras dengan menggunakan program Aplikasi SIMAK – BMN.
4. Membuat laporan dengan menggunakan program Aplikasi SMAP Polri.
5. Membuat rencana penarikan dana dengan menggunakan program aplikasi AFS untuk diajukan ke KPPN.
6. Membuat laporan dengan menggunakan program Aplikasi persediaan.
7. Melaksanakan revisi DIPA dengan Aplikasi DIPA / RKAKL.
8. Membuat laporan catatan atas laporan keuangan (CALK).

c. Pamin Data Urkeu

1. Melaksanakan pengumpulan data yang berkaitan dengan bidang keuangan antara lain: data belanja pegawai, Standar Biaya Umum (SBU) yang diberlakukan oleh Depkeu, Standar Biaya Khusus (SKB) di lingkungan Polri dan lain –lain.
2. Menginvenatrisasi barang pemilik Negara dan merekonsiliasi data BMN dengan Biro Sapras dan KPNL Bandung melalui program aplikasi SIMAK – BMN.
3. Mengoperasikan program aplikasi SAKPA / SAI.
4. Membuat laporan evaluasi penggunaan anggaran.
5. Menyiapkan data keuangan untuk bahan revisi.
6. Menyiapkan data keuangan untuk bahan mengajukan anggaran.
7. Menyiapkan data keuangan untuk bahan wasrik dan menindaklanjuti temua wasrik.
8. Melaksanakan pendataan untuk perhitungan Gaji dan tunjangan kinerja personel.

9. Mendatangkan penghasilan personel dalam buku penghasilan personel (format KU-11).

d. Pamin Akun / Verifikasi Urku

1. Melaksanakan pencocokan dan penelitian atas dokumen tagihan satker
2. Melaksanakan penertiban perwabku anggaran satker.
3. Menyusunan anev daya serap pelaksanaan anggaran.
4. Koordinasi dan rekonsolisasi dengan KPPN serta penertiban Bar hasil rekonsolisasi.
5. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan satker.

e. Pamin Gaji Urkeu

1. Membuat SKPP untuk Personil Bid TI Polri yang mengalami mutasi pindah Satker atan pension.
2. Membuat Daftar Gaji Bulanan.
3. Membuat laporan perubahan / mutasi Gaji Personil baik yang pindah maupun yang masuk.
4. Membuat laporan perwabku Gaji dan Uang makan PNS.
5. Membuat dan mengajukan daftar pembayaran kekurangan gaji / tunjangan (rapel).
6. Membuat daftar pembayaran tunjangan kinerja.
7. Merealisasi pembayaran gaji dan tunjangan personel Bid Ti Polri.

2.1. Landasan Teori

2.2.1. Perangakat Lunak

Dari perkembangan perangkat lunak, bisa membayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak, menggunakan aljabar Boolean, yang di representasikan sebagai binary digit (bit), yaitu 1 (benar / on) atau 0 (salah / off), cara ini sudah pasti sangat menyulitkan, sehingga orang mulai

mengelompokkan bit tersebut menjadi nible (4 bit), byte (8 bit), word (2 byte), double word (32 bit).

Kelompok-kelompok bit ini di susun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit ini di ubah menjadi kode-kode yang di kenal sebagai assembler. Kode-kode mesin sendiri masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghapal kode tersebut dan format (aturan) penulisannya yang cukup membingungkan, dari masalah ini kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia (bahasa Inggris). Saat ini pembuatan perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks, dengan urutan proses yang panjang dengan melibatkan puluhan bahkan ratusan orang dalam pembuatannya. [1]

2.2.1.1. Evolusi Perangkat Lunak

Dengan berjalannya waktu sebuah Perangkat Lunak juga mengalami perkembangan baik dalam segi code, tampilan ataupun dari segi fungsinya sehingga Perangkat Lunak telah mengalami perkembangan, diantaranya :

1. Era Pioner

   Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer, gambar berikut memperlihatkan orang yang sedang menggunakan komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan *punched card* yaitu kartu yang di lubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa *print out*. Proses yang di lakukan di dalam komputer berupa baris instruksi yang secara berurutan di proses.

2. Era Stabil

   Pada era stabil penggunaan komputer sudah banyak di gunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi, dari ini perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk.

3. Era Mikro

   Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat di bedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang di gunakan secara langsung oleh penggunannya untuk keperluan tertentu. Automatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan.

4. Era Modern

   Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggampun telah di lengkapi dengan perangkat lunak yang dapat di sinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC dan microwave, telah di tanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Dan yang hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. [1]

2.2.1.2. Kategori Perangkat Lunak

Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak. Teknologi yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya, yang disebut dengan dengan perangkat lunak (software) di dalam sirkuit komputer. Perangkat lunak dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu :

1. Perangkat lunak sistem operasi (**Operating System**), yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari sistem komputer
2. Perangkat lunak bahasa (**Language Software**), yaitu program yang digunakan untuk menterjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer
3. Perangkat lunak aplikasi (**Application Software**), yaitu program yang ditulis dan diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan aplikasi tertentu. [1]

2.2.2. Data

Data adalah kumpulan kejadian yang diambil dari suatu kenyataan atau fakta. Dapat berupa sebuah huruf, angka, symbol-simbol khusus dan gabungan dari semuanya. Data harus diolah agar menjadikan sebuah data itu informasi yang baik untuk diberikan. [2]

2.2.3. Database

Database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang terdiri atas satu atau lebih table yang terintegrasi satu sama lain, dimana satiap pemakai (user) diberi wewenang (otorisasi) untuk dapat mengakses, mengubah, menghapus, menganalisis, menambah dan memperbaiaki data di dalam tebel-tabel tersebut. [3]

2.2.4. Perangkat Lunak Yang Digunakan

2.2.4.1. Oracle

Oracle Database 11g Release 2 Enterprise Edition memberikan kinerja industri terbaik, skalabilitas, keamanan dan kehandalan yang didukung Windows, Linux, dan UNIX. Ini memberikan fitur yang lengkap agar dengan mudah mengatur proses pengolahan transaksi yang menuntut intelijen bisnis, dan aplikasi manajemen konten. Oracle Database 11g Release 2 Enterprise Edition dilengkapi dengan berbagai pilihan untuk memperluas database, untuk membantu mengembangkan bisnis dan memenuhi kebutuhan pelangagan serta memberikan keamanan dan harapan tingkat ketersediaan layanan yang memuaskan. Inilah beberapa manfaat yang kita peroleh bila menggunakan Oracle Database 11g Enterprise Edition:

- Melindungi dari kegagalan server, kegagalan situs, kesalahan manusia, dan mengurangi downtime.
- Mengamankan Data yang memungkinkan sesuai dengan row-level keamanan yang unik, auditing halus, transparan enkripsi data, dan total recall data.
- High-data kinerja pergudangan, pengolahan analitik online, dan data mining.
- Mudah mengelola seluruh siklus hidup informasi bagi database terbesar.
- Bisnis Konsolidasi aplikasi grid ke database yang cepat, handal dan scalable.
- Memaksimalkan ketersediaan data dan menghilangkan redundansi data center idle.
- Mempercepat kinerja dengan mengompres data ke partisi storage yang murah.

- Aman melindungi informasi dan data yang akurat.
- Menggandakan DBA produktivitas dan mengurangi risiko perubahan.
- Oracle Database Memperkenalkan Mesin Exadata X2-8.
- Oracle lebih mudah dalam mengelola DB2 dan SQL Server.
- Data Biaya-Efektif Pencegahan Kebocoran Dimulai pada Sumber.
- Tingkatan yang dicapai: Dunia mencatat kinerja dan harga yang baik.
- Kompresi kolumnar hibrida dengan kompresi data sebesar 10-15 kali.
- Pemindaian data terkompresi unutk eksekusi pencarian lebih cepat.
- Indeks penyimpanan untuk mengurangi lebih jauh I/O disk.Pembebanan proses pencarian pada penyimpanan dengan menggunakan Smart Scan.
- Aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada Mesin Database Sun Oracle dapat mencapai satu juta I/O.
- Operasi per Detik pada Flash Storage

2.2.4.2. MySql

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh user maupun program-program aplikasinya.

Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam query data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user, kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibandingkan Interbase. MySQL memiliki keistimewaan antara lain :

1. **Portabilitas**. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi.
2. **Open Source**. MySQL didistribusikan secara *open source*, dibawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara cuma-cuma.
3. **Multiuser**. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik.
4. **Performance tuning**. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu.
5. **Jenis Kolom**. MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti signed atau unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan lain-lain.
6. **Perintah dan Fungsi**. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah Select dan Where dalam perintah (*query*).
7. **Keamanan**. MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level subnetmask, nama host, dan izin akses *user* dengan sistem perizinan yang mendetail serta sandi terenkripsi.
8. **Skalabilitas dan Pembatasan**. MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya.
9. **Konektivitas**. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT).
10. **Lokalisasi**. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa Indonesia belum termasuk di dalamnya.
11. **Antar Muka**. MySQL memiliki interface (antar muka) terhadap berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application Programming Interface).
12. **Klien dan Peralatan**. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool) yang dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada setiap peralatan yang ada disertakan petunjuk online.

13. **Struktur tabel**. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani ALTER TABLE, dibandingkan basis data lainnya semacam PostgreSQL ataupun Oracle. [7]

2.2.4.3. WAMP Server

WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) merupakan Server yang dapat dijalankan komputer tanpa memerlukan sambungan Internet. Server di komputer ini disebut dengan Local Server (LocalHost) yang mana Server ini nantinya akan diinstall Website Hosting yang sudah memiliki system CMS (Content Management System), proses instalasi WebHosting CMS di lokal server ini disebut juga proses pembuatan DataBase di Komputer/local Server (LocalHost). [8]

2.2.4.4. Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework (dibaca *Microsoft Dot Net Framework*) atau lebih dikenal dengan singkatan dot net merupakan sebuah perangkat lunak kerangka kerja yang berjalan utamanya pada sistem operasi Microsoft Windows, saat ini .NET Framework umumnya telah terintegrasi dalam distribusi standar Windows (mulai dari Windows Server 2003 dan versi-versi Windows yang lebih baru). Kerangka kerja ini menyediakan sejumlah besar pustaka pemrograman komputer dan mendukung beberapa bahasa pemrograman serta interoperabilitas yang baik sehingga memungkinkan bahasa-bahasa tersebut berfungsi satu dengan lain dalam pengembangan sistem. Berbeda halnya dengan tipikal aplikasi konvensional umumnya, program yang ditulis dengan memanfaatkan .NET Framework berjalan pada lingkungan perangkat lunak melalui Common Language Runtime, dan bukan perangkat keras secara langsung. Hal ini memungkinkan aplikasi yang dibuat di atas .NET secara teoritis dapat berjalan pada perangkat keras apapun yang didukung oleh .NET Framework. Perangkat lunak ini adalah kunci penawaran utama dari Microsoft, dan dimaksudkan untuk digunakan oleh sebagian besar aplikasi-aplikasi baru yang dibuat untuk platform Windows.

Pada dasarnya, .NET Framework memiliki 2 komponen utama: CLR dan .NET Framework Class Library.

Program - program yang ditulis untuk .NET Framework dijalankan pada suatu lingkungan software yang mengatur persyaratan-persyaratan runtime program. *Runtime*

environment ini, yang juga merupakan suatu bagian dari .NET Framework, dikenal sebagai *Common Language Runtime* (CLR). CLR menyediakan penampilan dari *application virtual machine*, sehingga para programmer tidak perlu mengetahui kemampuan CPU tertentu yang akan menjalankan program. CLR juga menyediakan layanan-layanan penting lainnya seperti jaminan keamanan, pengaturan memori, *garbage collection* dan *exception handling* / penanganan kesalahan pada saat *runtime*. Class library dan CLR ini merupakan komponen inti dari .NET Framework. Kerangka kerja itu pun dibuat sedemikian rupa agar para programmer dapat mengembangkan program komputer dengan jauh lebih mudah, dan juga untuk mengurangi kerawanan aplikasi dan juga komputer dari beberapa ancaman keamanan.

CLR adalah turunan dari CLI (Common Language Infrastructure) yang saat ini merupakan standar ECMA. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan mengunjungi situs ECMA atau kunjungi sumber pranala di bawah artikel ini.

Solusi-solusi program pembentuk *class library* dari .NET Framework mengcover area yang luas dari kebutuhan program pada bidang user interface, pengaksesan data, koneksi basis data, kriptografi, pembuatan aplikasi berbasis web, algoritma numerik, dan komunikasi jaringan. Fungsi-fungsi yang ada dalam *class library* dapat digabungkan oleh *programmer* dengan kodenya sendiri untuk membuat suatu program aplikasi baru.